



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN KULO
Jl. Pangaran Diponegoro No. 7 Kulo Kode Pos 91653
SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN CAMAT KULO
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KANTOR CAMAT KULO TAHUN 2021
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

CAMAT KULO
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021, maka dipandang perlu untuk menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 Kantor Camat Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2021 Kantor Camat Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2020;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
 17. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2000-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 No. 12);
 20. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 50);

21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24.a Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016, (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 24.a);
22. Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang nomor : 317.a/X/2014 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2014-2018;
23. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 0/I/2018 Tanggal 4 Januari 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada masing-masing Satuan Kerja Dan Perangkat Daerah (SKPD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kulo Tahun 2021 Kabupaten Sidenreng Rappang dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya .

**Di tetapkan di Kulo
pada tanggal, 27 Juli 2020**

**CAMAT KULO
KAB. SIDENRENG RAPPANG,**

**ALI HUSAIN, S.IP., M.Si
NIP. 19710227 199202 1 002**

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang
5. Peringgal

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenaan Pemerintah Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. Rencana kerja, disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, diharapkan juga menyatukan persepsi, strategi seluruh aparat dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 menyajikan tentang latarbelakang yang dilakukan di tahun 2021, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kulo Tahun 2021. Olehnya itu masukan yang sifatnya menyempurnakan sangat diharapkan.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga upaya kita mendapat Hidayah dan Ridho-nya. Aamiin.

Kulo, 27 Juli 2020
Camat Kulo

ALI HUSAIN, S.IP.,M.Si
NIP. 19710227 199202 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirnat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kulo Tahun 2020 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Perubahan RENJA ini adalah perencanaan program dan kegiatan yang akan kami lakukan pada Tahun 2020 dan merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan ini masih belum sempurna sehingga kritik, saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan guna kesempurnaan dalam penyusunan RENJA ditahun yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan RENJA ini.

Kulo, 27 Juli 2020
Camat Kulo

ALI HUSAIN, S.IP.,M.Si.
NIP. 19710227 199202 1 002

KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra Kecamatan Kulo	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kulo	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kulo	9
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	12
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	15
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	15
3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Propinsi.....	18
3.3 Telaahan Tergadap Kebijakan Kabupaten Sidenreng Rappang....	19
3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kulo	20
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
4.1 Program dan Kegiatan	21
BAB V PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Kulo mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Kulo dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan setiap tahun. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renja Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Kulo. Sejalan dengan itu, muatan Renja Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah 2005-2025
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang

- Tahun 2012 –2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012, Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 09);
 16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 36);
 17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2021 dan Renstra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 terutama yang terkait dengan Urusan Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Kulo adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2021 serta sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kulo untuk jangka waktu satu tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kulo memuat :

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latarbelakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan Renja Kecamatan Kulo tahun 2021.

Bab II merupakan bab yang memuat tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kulo untuk tahun 2021. Pada bab ini membahas tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kulo tahun lalu Capaian Renstra Kecamatan Kulo, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kulo, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kulo, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan musrenbang.

Bab III merupakan bab tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Pada Bab ini menjelaskan tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, telaahan terhadap kebijakan propinsi, tujuan dan sasaran renja Kecamatan Kulo.

Bab IV merupakan bab tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah. pada bab ini menjelaskan tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Kulo pada tahun 2021.

Bab V merupakan Penutup, pada bab ini menjelaskan tentang catatan yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Kulo

Capaian kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2019 beserta capaian Renstra Kantor Kecamatan Kulo dengan bidang kewenangan administrasi untuk Pemerintahan serta misi meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan dan sasaran misi meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2020 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mencakup kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik, Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /Operasional, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dan Pelayanan Administrasi Perkantoran telah mencapai realisasi kinerja sebesar 100 % dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 40 %.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mencakup kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Mebeleur, Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah dinas, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor telah mencapai tingkat realisasi target Renja 100% dan Capaian target

Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 40%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan mencakup kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran, dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2019 telah mencapai tingkat realisasi target Renja 100% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 20%.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mencakup kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan, dengan tingkat target Renja 0% dari target sebesar 0% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 20% dari target sebesar 20%.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2020 yang diuraikan di atas adalah evaluasi program dan kegiatan yang mana klasifikasi, kodifikasi dan nomenklaturnya didasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dampak yang timbul terhadap capaian program yang terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah :

1. Meningkatnya Keefektifan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi prima sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat
3. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Muspika, Dinas Instansi, UPT Kepala Desa se Kecamatan Kulo
4. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Insrastruktur

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian integral dari keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pepaduserasian,penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan

dan pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Kulo dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Sidrap. Penyelarsan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas Renja Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan

pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kecamatan dan Desa.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo Tahun 2019 dijelaskan pada lampiran 1. Tabel TC.29.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kulo

Secara kelembagaan, Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di Kecamatan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kulo diukur berdasarkan pencapaian terhadap target capaian indikator kinerja pada renstra. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kulo tahun 2019 yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 76 % dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 76 % dan,
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan untuk tahun 2019 belum ada program kegiatan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Perangkat Daerah Kecamatan kulo sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kulo merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan Srategis Pemerintah.

Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Kulo, ditetapkan 2 (dua) indikator yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Tingkat Kepuasan Masyarakat.

Berdasarkan indikator di atas dirumuskan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Kulo;
2. Tingkat Kepuasan Masyarakat dengan sasaran tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Analisis capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kulo dapat dilihat pada lampiran 2. Table TC-30.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kulo

Isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kulo sebagai berikut :

1. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan PD Kecamatan Kecamatan Kulo telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Kulo
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Kulo antara lain :
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
 - b. Belum semuanya terpenuhi usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Kulo hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Sidenreng Rappang. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kulo sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Kulo terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;

- c. Melemahnya ketahanan sosial ekonomi akibat pandemi covid 19 sehingga pemerintah memprioritaskan pemulihan sosial ekonomi akibat covid 19 dan transformasi ekonomi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD. Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Kecamatan Kulo beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kulo diantaranya :
 - a. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Kecamatan Kulo masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran
 - b. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait ;
 - c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal / maksimal, dan tepat waktu ;
 - d. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat ;
 - e. Pemohon KK, KTP dan AKTA KELAHIRAN di wilayah Kecamatan Kulo cukup banyak, sedangkan peralatan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut di kecamatan belum ada sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan layanan tersebut harus ke tingkat Kabupaten;
 - f. Semakin transparanya informasi melalui media elektronik dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Kulo antara lain :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif ;
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan Kecamatan Kulo dengan Muspika, Dinas Instansi, UPT, Kepala Desa dan Perangkat Desa, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi ;
3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan ;
4. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Kecamatan Kulo dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ;
5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai ;
6. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan ;
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantran;
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Kulo berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah se Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kulo.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijelaskan pada lampiran 3. Tabel TC.31.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Pada tahun 2020, telah dilaksanakan MUSRENBANG untuk pelaksanaan kegiatan 2021. Usulan tersebut akan dirumuskan oleh instansi teknis terkait yang dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah teknis untuk tahun 2021. Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perdagangan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan instansi terkait di Kabupaten Sidrap.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kulo pada tahun 2021 yang terkait dengan usulan masyarakat tidak termasuk dalam wewenang kecamatan, sebagaimana kedudukan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya melalui :

1. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
2. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
3. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.
4. Peningkatan kualitas pembinaan di masyarakat sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi dalam hal pembangunan dan mendorong minat masyarakat untuk peningkatan taraf perekonomian.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh Pokok pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Kulo, maka keempat hal tersebut di atas perlu dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kulo. Sesuai dengan fungsi kecamatan kulo yaitu mengkoordinasikan dan memfasilitasi, maka terkait dengan usulan masyarakat tidak dilaksanakan penganggarannya.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada lampiran 4. Tabel TC.32.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi system kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, bencana alam maupun bencana nonalam. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun penjelasan dari prioritas nasional adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaannya diantaranya melalui : menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan

kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat Gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk : penguatan upaya pencegahan, penanggulangan,

pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid 19

3.2 Telaahan terhadap kebijakan Propinsi

Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2021 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Sulawesi untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karakteristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan adalah ***“Mempercepat Pemulihan Ekonomi Dan Sosial Yang Di Dukung Pembangunan Infrastruktur Dan Kualitas SDM”***.

Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, antara lain:

- a. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Berdayasaing
- b. Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin

Pemerataan

- c. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Untuk Akselerasi Pertumbuhan
- d. Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Transformasi Perlindungan Sosial
- d. Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kelestarian Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Serta Meningkatkan Ketahanan Bencana Serta Perubahan Iklim
- e. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Serta Pelayanan Publik

3.3 Telaahan terhadap kebijakan Kabupaten Sidenreng Rappang

Setelah disajikan tujuan dan sasaran, selanjutnya disajikan strategi pembangunan daerah yang merupakan bagian yang menyajikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Perumusan strategi juga memperhatikan masalah dan isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Permendagri No. 86 tahun 2017 memberi penegasan operasional, bahwa strategi merupakan langkah atau upaya berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, adapun Tema Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 adalah ***“Mempercepat Pemulihan Ekonomi Melalui Pengembangan Potensi dan Daya Saing Daerah Menuju Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera”***. Dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses Pendidikan dan kesehatan;
- b. Penguatan perekonomian daerah
- c. Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
- d. Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah
- e. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public
- f. Pengembangan Kawasan pedesaan
- g. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religious, berbudaya dan aman

3.4 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, maka Kecamatan Kulo mempunyai beberapa tujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial.

Adapun Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo adalah ***Meningkatkan Kualitas pelayanan pada Masyarakat kecamatan Kulo.***

Sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo menuju terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitas di Kecamatan Kulo secara optimal. Adapun sasaran Kecamatan Kulo adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas pelayanan Kecamatan Kulo.
- b. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengakses pembangunan.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka indikator sasaran kecamatan kulo adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Program Kerja Kantor Kecamatan Kulo maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Kegiatan disusun berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya akan menjadi cerminan pada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik
 3. Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 4. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 6. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
 8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
 10. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung Kantor
 2. Pengandaan Perlengkapan Rumah Dinas
 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 5. Pengadaan Mebeleur
 6. Pengadaan Kendaraan Dinas
 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan
 11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Adapun estimasi anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp. 696.543.000,- yang rencana akan dialokasikan melalui program kegiatan Kecamatan Kulo adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran rencana alokasi sebesar Rp 372.632.000,
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan rencana alokasi sebesar Rp. 270.960.000,-
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan rencana alokasi sebesar Rp. 2.970.000,-
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2021 dan perkiraan maju Tahun 2022 untuk kecamatan kulo dapat dilihat pada lampiran 5. Tabel TC-33.

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Kulo menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh perangkat Kecamatan Kulo dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun kedepan. Camat Kulo menjadi penanggungjawab atas implementasi, pengendalian, dan evaluasi seluruh program dan kegiatan di Kantor Kecamatan Kulo dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Kulo sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Kulo;
3. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Kulo;
4. Kecamatan Kulo berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Kecamatan Kulo Tahun 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023.

Kulo, 27 Juli 2020
CAMAT KULO

ALI HUSAIN, S.IP.,M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19710227 199202 1 002

TABEL TC.29
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN KULO SAMPAI DENGAN TAHUN 2020
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (OutPut)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan 2018	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun 2020	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD 2019 s.d 2023		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	PENDAPATAN										
1.20.20.00.00.5	BELANJA										
4.08.06.00	Belanja Langsung										
4.08.06.01	Program Pelayanan. Adm Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	4664	440	638	638	100	850	1928	41	Kegiatan Rutin
4.08.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	2.920 Lembar	300	450	450	100	570	1320	45	Kegiatan Rutin
4.08.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SD Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	12	12	12	100	12	36	60	Kegiatan Rutin
4.08.06.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	5 Bulan	1	1	1	100	1	3	60	Kegiatan Rutin
4.08.06.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas/Op.	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	15 Unit	3	3	3	100	3	9	60	Kegiatan Rutin
4.08.06.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	60 Bulan	12	12	12	100	12	36	60	Kegiatan Rutin
4.08.06.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 Bulan	12	12	12	100	12	36	60	Kegiatan Rutin

4.08.06.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	60	Bulan	12	12	12	100	12	36	60	Kegiatan Rutin
4.08.06.01.18	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	88	Kali	9	14	14	100	16	39	44	Kegiatan Rutin
4.08.06.01.19	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1.336	Kali	67	110	110	100	200	377	28	Kegiatan Rutin
4.08.06.01.20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu Penyediaan Administrasi Perkantoran Lainnya	60	Bulan	12	12	12	100	12	36	60	Kegiatan Rutin
4.08.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	334		21	59	59	100	70	150	45	Kegiatan Rutin
4.08.06.02.02	Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas	2	Unit	0	0	0	0	1	1	50	Kegiatan Rutin
4.08.06.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	2	Unit	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Rutin
4.08.06.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Rumah Dinas	20	Unit	0	0	0	0	5	5	25	Kegiatan Rutin
4.08.06.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	103	Unit	0	19	19	100	20	39	38	Kegiatan Rutin
4.08.06.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	105	Unit	10	15	15	100	21	46	44	Kegiatan Rutin
4.08.06.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	34	Unit	0	15	15	100	8	23	68	Kegiatan Rutin
4.08.06.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	5	Unit	1	1	1	100	1	3	60	Kegiatan Rutin
4.08.06.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5	Unit	1	1	1	100	1	3	60	Kegiatan Rutin
4.08.06.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	8	Unit	0	0	0	0	2	2	25	Kegiatan Rutin
4.08.06.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara rutin/berkala	12	Unit	3	3	3	100	3	9	75	Kegiatan Rutin
4.08.06.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas	Jumlah dan Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Dinas secara Berkala	16	Unit	1	0	0	#DIV/0!	5	6	38	Kegiatan Rutin
4.08.06.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	25	Unit	5	5	5	100	5	15	60	Kegiatan Rutin
4.08.06.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	21	Unit	0	0	0	0	4	4	19	Kegiatan Rutin

4.08.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	10	Lap.	2	2	2	100	2	6	60	Kegiatan Rutin
4.08.06.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	10	Lap.	2	2	2	100	2	6	60	Kegiatan Rutin
4.08.06.25	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan	48	Bulan	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Rutin
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Waktu Pelaksanaan kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Perencanaan Pembangunan kecamatan	48	Bulan	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Rutin

KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG

Tabel TC-30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
KANTOR KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM/STAN DAR NASIONAL	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	5	4	7	8	8	8	11	11	12	12	13	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			76	%	76	78	80	76	0	78	80	
1.1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100	%	100	100	100	100	0	100	100	
1.1.1	Jumlah Dokumen Bermaterai			450	Lembar	570	570	650	450	177	570	650	
1.1.2	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	Bulan	12	12	12	12	5	12	12	
1.1.3	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah			1	Unit	1	1	1	1	0	1	1	
1.1.4	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan			3	Unit	3	3	3	3	0	3	3	
1.1.5	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan			12	Bulan	12	12	12	12	0	12	12	
1.1.6	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			12	Bulan	12	12	12	12	5	12	12	
1.1.7	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor			12	Bulan	12	12	12	12	5	12	12	
1.1.8	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			14	Kali	16	16	17	14	6	16	17	

1.1.9	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		110	Kali	200	200	310	110	24	200	310	
1.1.10	Waktu Penyediaan Administrasi Perkantoran Lainnya		12	Bulan	12	12	12	12	6	12	12	
1.2	Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	%	100	100	100	100	0	100	100	
1.2.1	Jumlah Pembangunan rumah Dinas		0	Unit	0	1	0	0	0	1	0	
1.2.2	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor		0	Unit	0	0	1	0	0	0	1	
1.2.3	Jumlag dan Jenis Perlengkapan rumah Dinas		0	Unit	0	4	5	0	0	4	5	
1.2.4	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan		19	Unit	19	20	22	19	0	20	22	
1.2.5	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang diadakan		15	Unit	15	21	24	15	6	21	24	
1.2.6	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan		15	Unit	8	8	9	15	0	8	9	
1.2.7	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala		1	Unit	1	1	1	1	0	1	1	
1.2.8	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		1	Unit	1	1	1	1	0	1	1	
1.2.9	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan		0	Unit	0	2	2	0	0	2	2	
1.2.10	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara rutin/berkala		3	Unit	3	3	3	3	2	3	3	
1.2.11	Jumlah dan jenis Pemeliharaan Perlengkapan Rumah dinas Secara Berkala		1	Unit	0	0	5	0	0	0	5	
1.2.12	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala		5	Unit	5	5	5	5	1	5	5	
1.2.13	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala		0	Unit	4	4	4	0	1	4	4	

1.3	Persentase Capaian Kinerja Keuangan			2	Laporan	2	0	2	2	0	0	2	
1.3.1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD			2	Laporan	2	0	2	2	0	0	2	
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan			87	%	88	89	90	100	0	89	90	
2.1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan			0	Bulan	0	12	12	-	-	12	12	
2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			0	Bulan	0	12	12	0	0	12	12	

KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG

Tabel TC-31

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Kode	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	
4.08.06.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Kulo	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran		283.963.000	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Kulo	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran		372.623.000	
4.08.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kulo	Jumlah Dokumen Bermaterai	450 Lembar	2.250.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kulo	Jumlah Dokumen Bermaterai	570 Lembar	2.610.000	
4.08.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kulo	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	15.888.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kulo	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	17.476.000	
4.08.06.01.5	Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Kec. Kulo	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	1 Unit	5.500.000	Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Kec. Kulo	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	1 Unit	6.050.000	
4.08.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kec. Kulo	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	3 Unit	1.375.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kec. Kulo	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	3 Unit	1.550.000	
4.08.06.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Kulo	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	0 Bulan	-	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Kulo	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	12 Bulan	45.000.000	
4.08.06.01.08	penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Kulo	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	8.227.000	penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Kulo	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	11.500.000	

4.08.06.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan gedung	Kec. Kulo	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Bulan	7.650.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan gedung	Kec. Kulo	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Bulan	8.000.000	
4.08.06.01.18	Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kec. Kulo	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15 Kali	10.000.000	Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kec. Kulo	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	16 Kali	75.000.000	
4.08.06.01.19	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kec. Kulo	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	200 Kali	66.000.000	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kec. Kulo	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	200 Kali	15.500.000	
4.08.06.01.20	Penyediaan Administrasi Perkantoran Lainnya	Kec. Kulo	Waktu Penyediaan Administrasi Perkantoran Lainnya	12 Bulan	167.073.000	Penyediaan Administrasi Perkantoran Lainnya	Kec. Kulo	Waktu Penyediaan Administrasi Perkantoran Lainnya	12 Bulan	189.937.000	
4.08.06.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Kulo	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		130.665.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Kulo	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		270.950.000	
4.08.06.02.02						Pembangunan Gedung Kantor	Kec. Kulo	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	1 Unit	200.000.000	
4.08.06.02.03						Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas	Kec. Kulo	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Rumah Dinas	5 Lusin/Unit	13.500.000	
4.08.06.02.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Kulo	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	0 Buah	-	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Kulo	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	20 Unit	40.000.000	
4.08.06.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Kulo	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	7 Lusin/Unit	46.920.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Kulo	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	21 Unit/Bh	51.200.000	
4.08.06.02.10	Pengadaan Mebeleur	Kec. Kulo	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	27 Unit	20.925.000	Pengadaan Mebeleur	Kec. Kulo	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	8 Unit	30.000.000	

4.08.06.02.21	Pemeliharaan Rutin / berkala rumah dinas	Kec. Kulo	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	5.016.000	Pemeliharaan Rutin / berkala rumah dinas	Kec. Kulo	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	7.000.000	
4.08.06.02.22	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Kec. Kulo	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	11.956.000	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Kec. Kulo	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	40.000.000	
4.08.06.02.05						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kec. Kulo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	2 Unit	44.000.000	
4.08.06.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Kulo	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara rutin/berkala	3 Unit	41.098.000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Kulo	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara rutin/berkala	3 Unit	46.750.000	
4.08.06.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan gedung kantor					Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Dinas	Kec. Kulo	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas yang dipelihara rutin/berkala	5 Unit	3.500.000	
4.08.06.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan gedung kantor	Kec. Kulo	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	11 Unit	3.500.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan gedung kantor	Kec. Kulo	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 Unit	6.000.000	
4.08.06.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung kantor	Kec. Kulo	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 Unit	1.250.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung kantor	Kec. Kulo	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	4 Unit	2.500.000	
4.08.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Kulo	Persentase capaian kinerja keuangan	0 Laporan	-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Kulo	Persentase capaian kinerja keuangan	2 Laporan	2.970.000	
4.08.06.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja skpd	Kec. Kulo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	0 Laporan	0	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja skpd	Kec. Kulo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	2 Laporan	2.970.000	
4.08.06.15	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12 Bulan	32.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Kulo	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan	12 Bulan	50.000.000	

			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	12 Bulan	32.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kec. Kulo	Waktu Pelaksanaan kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam forumPerencanaan Pembangunan kecamatan	12 Bulan	50.000.000	
	JUMLAH				446.628.000					746.543.000	

KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG

Tabel TC-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KANTOR KECAMATAN KULO

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHA DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.08.06.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Kec. Kulo		372.623.000				407.660.700
4.08.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	Kec. Kulo	Lembar 570	2.610.000	PAD		650	3.000.000
4.08.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kulo	Bulan 12	17.476.000	PAD		12	19.225.000
4.08.06.01.05	Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	Kec. Kulo	Unit 1	6.050.000	PAD		1	6.650.000
4.08.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Kec. Kulo	Unit 3	1.550.000	PAD		3	1.705.000
4.08.06.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	Kec. Kulo	Bulan 12	45.000.000	PAD		12	50.000.000
4.08.06.01.08	penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Kulo	Bulan 12	11.500.000	PAD		12	12.650.000

4.08.06.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan gedung	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kec. Kulo	Bulan	12	8.000.000	PAD		12	8.500.000
4.08.06.01.18	Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Kulo	Kali	16	75.000.000	PAD		17	80.000.000
4.08.06.01.19	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kec. Kulo	Kali	200	15.500.000	PAD		310	17.000.000
4.08.06.01.20	Penyediaan Administrasi Perkantoran Lainnya	Waktu Penyediaan Administrasi Perkantoran Lainnya	Kec. Kulo	Bulan	12	189.937.000	PAD		12	208.930.700
4.08.06.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur				484.450.000	PAD			320.695.000
4.08.06.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan gedung Kantor	Kec. Kulo	Unit	1	200.000.000			0	-
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas	Jumlah dan Jenis Perlengkapan rumah dinas	Kec. Kulo	Lusin/Unit	5	13.500.000			5	14.850.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Kec. Kulo	Unit	20	40.000.000	PAD		22	50.000.000
4.08.06.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Kec. Kulo	Unit/Bh	21	51.200.000	PAD		24	56.320.000
4.08.06.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	Kec. Kulo	Unit	8	30.000.000	PAD		9	33.000.000
4.08.06.02.21	Pemeliharaan Rutin / berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	Kec. Kulo	Unit	1	7.000.000	PAD		1	8.500.000
4.08.06.02.22	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kec. Kulo	Unit	1	40.000.000	PAD		1	45.000.000
4.08.06.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang diadakan	Kec. Kulo	Unit	2	44.000.000			2	48.400.000

4.08.06.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara rutin/berkala	Kec. Kulo	Unit	3	46.750.000	PAD		3	51.425.000
4.08.06.02.25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas yang dipelihara rutin/berkala	Kec. Kulo	Unit	5	3.500.000	PAD		5	3.850.000
4.08.06.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kec. Kulo	Unit	5	6.000.000	PAD		5	6.600.000
4.08.06.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kec. Kulo	Unit	4	2.500.000	PAD		4	2.750.000
4.08.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase capaian kinerja keuangan			0	2.970.000			2	3.267.000
4.08.06.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Kec. Kulo	2	0	2.970.000	PAD		2	3.267.000
4.08.06.15	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan				50.000.000			2	60.000.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Waktu Pelaksanaan kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam forumPerencanaan Pembangunan kecamatan	Kec. Kulo		12	50.000.000	PAD		2	60.000.000

KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KECAMATAN KULO

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																		
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE								
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
					Non Program/Belanja Tak Langsung																		
					Gaji dan Tunjangan Pegawai	Pemberian Gaji dan Tunjangan PNS dan CPNS	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administra si Keuangan	Cakupan layanan Administrasi Keuangan													
					Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS	Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS														X	XX	01	2.02
					Program/Belanja Langsung																		
4.08	08	06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja Kecamatan					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja Kecamatan					X	XX	01				
4.08	08	06	01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah dokumen Yang dilaporkan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Yang dilaporkan	Administra si Keuangan	Cakupan layanan Administrasi Keuangan									X	XX	01	2.02	06
4.08	08	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Aministrasi Perkantoran																	
4.08	08	01	01		Penyedia jasa surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	Penyedia jasa surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	Administra si Umum	Cakupan Layanan Administrasi										X	XX	01	2.03

4.08	08	01	02		Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik		Umum					X	XX	01	2.03	02
4.08	08	01	05		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang diasuransikan	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang diasuransikan							X	XX	01	1.03	05
4.08	08	01	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara surat-suratnya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara surat-suratnya							X	XX	01	1.03	06
4.08	08	01	07		Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	Waktu penyedia jasa Adminitrasi Keuangan kantor	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	Waktu penyedia jasa Adminitrasi Keuangan kantor							X	XX	01	1.03	07
4.08	08	01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor							X	XX	01	1.03	08
4.08	08	01	11		Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Waktu penyedia alat listrik dan elektronik	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Waktu penyedia alat listrik dan elektronik							X	XX	01	1.03	12
4.08	08	01	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar daerah							X	XX	01	1.03	18
4	08	01	19		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dihapus karena tidak terdapat sub kegiatan yang sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019												
4.08	08	01	20		Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Waktu Penyediaan adminitrasi perkantoran lainnya	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan adminitrasi perkantoran lainnya							X	XX	01	1.03	10
4.08	08	01	20				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan adminitrasi perkantoran lainnya							X	XX	01	1.03	11

4.08	08	01	20				Penyediaan Makanan dan Minuman	Waktu Penyediaan administrasi perkantoran lainnya							X	XX	01	1.03	17
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
4.08	08	02					Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembangunan rumah dinas	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Pembangunan rumah dinas					X	XX	01	1.03	38
4.08	08	02	07				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis Perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis Perlengkapan gedung kantor					X	XX	01	1.03	23
4.08	08	02					Pengadaan perlengkapan rumah dinas	Jumlah dan jenis Perlengkapan Rumah dinas	Pengadaan perlengkapan rumah dinas	Jumlah dan jenis Perlengkapan Rumah dinas					X	XX	01	1.03	22
4.08	08	02	09				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor					X	XX	01	1.03	25
4.08	08	02	10				pengadaan mebeluer	Jumlah dan jenis mebeluer	Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan jenis mebeluer					X	XX	01	1.03	26
4.08	08	02	21				Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah dan jenis pemeliharaan rumah dinas secara berkala	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah dan jenis pemeliharaan rumah dinas secara berkala					X	XX	01	1.03	28
4.08	08	02	22				pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor	Jumlah dan jenis pemeliharaan gedung kantor secara berkala	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah dan jenis pemeliharaan gedung kantor secara berkala					X	XX	01	1.03	29
4.08	08	02					Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang di adakan	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang di adakan					X	XX	01	1.03	21
4.08	08	02	24				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara secara berkala	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara secara berkala					X	XX	01	1.03	31

4.08	08	02				pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah dinas	Jumlah dan jenis pemeliharaan perlengkapan rumah dinas secara berkala	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah dan jenis pemeliharaan perlengkapan rumah dinas secara berkala									X	XX	01	1.03	32
4.08	08	02	26			Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala									X	XX	01	1.03	33
4.08	08	02	28			Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala									X	XX	01	1.03	35
4.08	08	01				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa							Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Kecamatan	Unsur Wilayah	7	01	03		
4.08	08	01				Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Masyarakat desa yang berpartisipasi dalam forum musyawarah							7	01	03	2.01	01

KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG